

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS 2017-2022

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Manuel Lumban Tobing

12170212

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2023

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS 2017-2022

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana Akuntansi**



Disusun Oleh:

Manuel Lumban Tobing

12170212

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Manuel Lumban Tobing
NIM : 12170212
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS 2017-2022”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 04 Juli 2024

Yang menyatakan



(Manuel Lumban Tobing)

NIM. 12170212

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2022)"

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Manuel Lumban Tobing

12170212

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal (18 Januari 2024)

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Eka Adi Wibowo, SE, M.Sc.
(Ketua Dosen Penguji)
2. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Ak., CA.
(Dosen Penguji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si.
(Dosen Pembimbing)



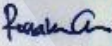




Yogyakarta, 25 Januari 2024

Disahkan Oleh


Fakultas Bisnis
Dr. Permisa Prangeran, SE., M.Si., CSA., CRP

Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Christanti, S.E., M.Acc

DUTA WACANA

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul
“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2017-2022”

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi sarjana pada program Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau Instansi mana pun, Kecuali bagian dari sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya. Jika saya dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil dari plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 18 Desember 2023



Manuel Lumban Tobing

12170212

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 2017-2022”**. Sebagaimana diketahui, penyusunan penulisan skripsi ini diselesaikan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana.

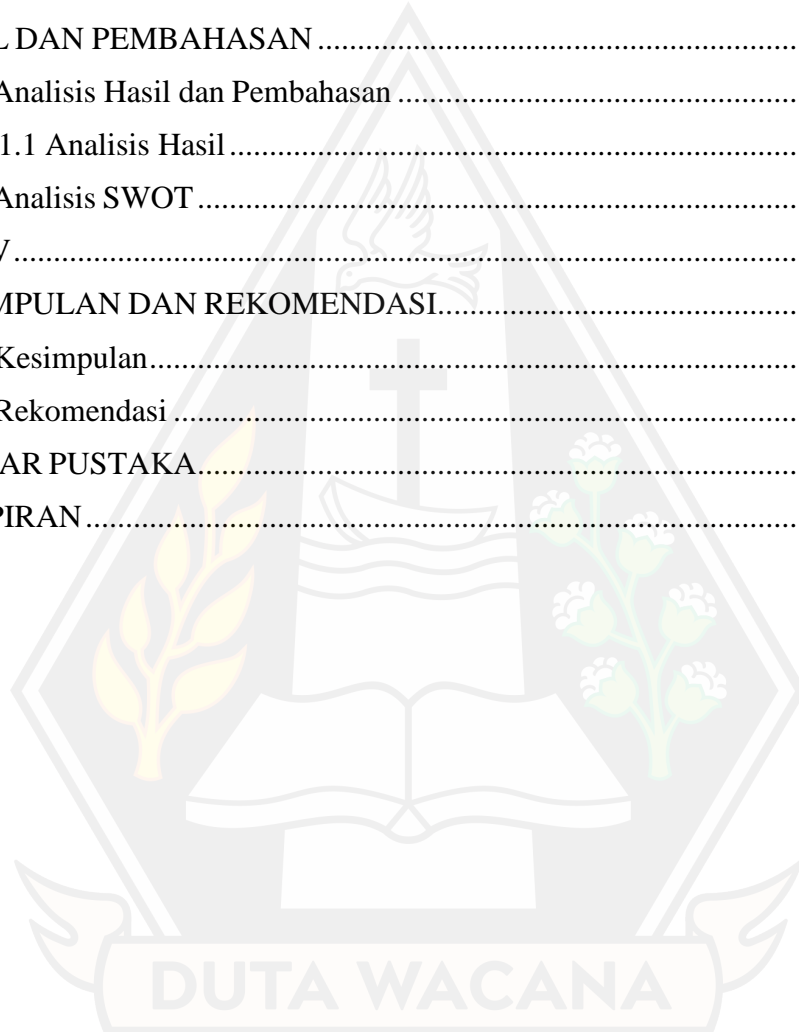
Dalam proses penulisan penelitian, penulis menyadari bahwa setiap proses penulisan dari awal sampai akhir tidak mudah, maka dari itu, penulis mengucapkan Terima kasih kepada Ibu Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih M.Si, selaku dosen pembimbing yang mendampingi dan memberikan arahan dalam penyusunan penulisan penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan penulisan penelitian ini, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Penulis berharap penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Penelitian	7
BAB II.....	8
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Teori).....	8
2.1.2 Otonomi Daerah.....	10
2.1.3 Keuangan Daerah.....	11
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	12
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah	13
2.2 Penelitian Terdahulu.....	14
2.3 Analisis SWOT	15
BAB III.....	18
METODE PENELITIAN	18

3.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data	18
3.1.1 Jenis Data	18
3.1.2 Metode Pengumpulan Data	18
3.1.3 Teknik Analisis	18
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	19
3.2.1 Teknik Analisis Rasio	19
3.2.2 Gambaran Umum Daerah	22
BAB IV	27
HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Analisis Hasil dan Pembahasan	27
4.1.1 Analisis Hasil	27
4.2 Analisis SWOT	38
BAB V	41
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Rekomendasi	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	47



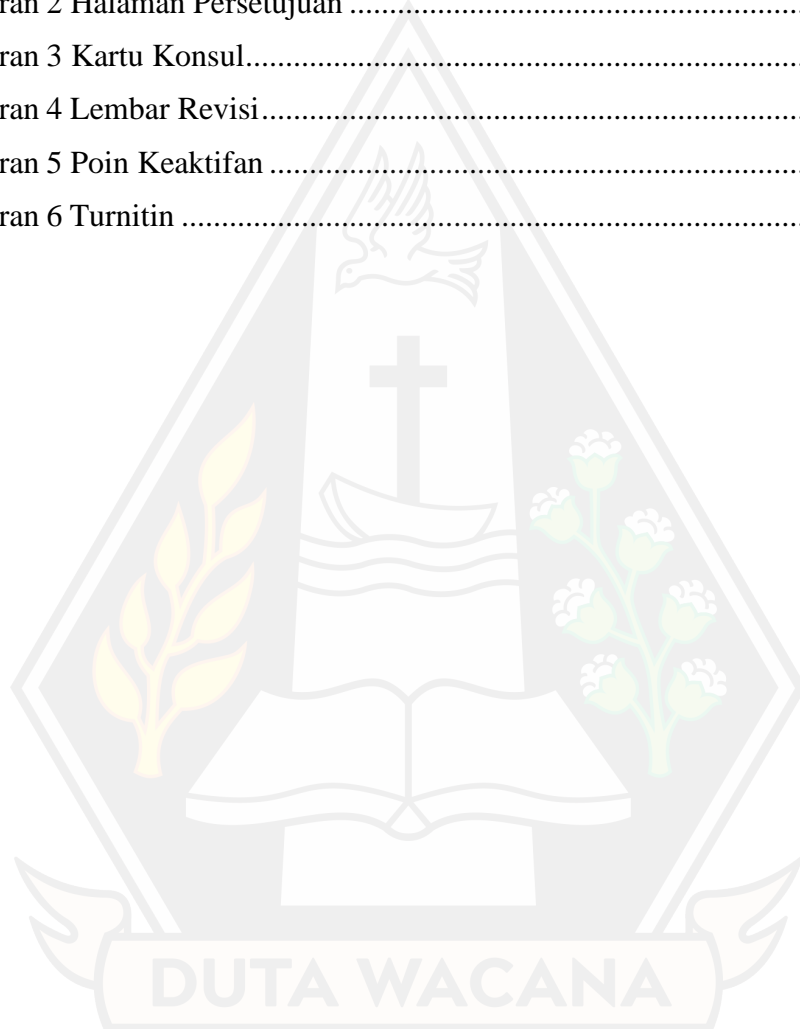
DAFTAR TABEL

Tabel 3. 5 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi.....	19
Tabel 3. 6 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah	20
Tabel 3.7 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	20
Tabel 3. 8 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan	21
Tabel 3. 9 Tingkat Efektivitas PAD	21
Tabel 3. 10 Tingkat Keserasian Daerah	22
Tabel 3. 11 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	22
Tabel 4. 1 Rasio Desentralisasi Kabupaten Bengkulu tahun 2017 - 2022.....	27
Tabel 4. 2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkulu	29
Tahun 2017-2022.....	29
Tabel 4. 3 Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2022	31
Tabel 4. 4 Rasio Kemandirian Kabupaten Bengkulu	32
Tahun 2017-2022.....	32
Tabel 4. 5 Rasio Efektivitas Kabupaten Bengkulu	34
Tahun 2017-2022.....	34
Tabel 4. 6 Rasio Keserasian Pada Belanja Operasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2022	35
Tabel 4. 7 Rasio Keserasian Pada Belanja Modal Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2022	35
Tabel 4. 8 Rasio Efisiensi Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2022	37

DUTA WACANA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN.....	47
Lampiran 1 Data/Olah Data.....	47
Lampiran 2 Halaman Persetujuan	51
Lampiran 3 Kartu Konsul.....	52
Lampiran 4 Lembar Revisi.....	54
Lampiran 5 Poin Keaktifan	55
Lampiran 6 Turnitin	56



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2017–2022**

Manuel Lumban Tobing

12170212

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

12170212@students.ukdw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkalis Periode 2017–2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan RAPBD pada Pemerintah Kota Bengkalis Periode 2017–2022 dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Hasil rata-rata persentase rasio dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai 2022 Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih belum bertumbuh secara maksimal.

Kata Kunci: RAPBD, Rasio kemandirian keuangan, Rasio derajat desentralisasi, Rasio ketergantungan, Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, Rasio efisiensi keuangan daerah, Rasio pertumbuhan dan Rasio keserasian

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN THE LOCAL GOVERNMENT OF
BENGKALIS REGENCY FOR THE PERIOD**

2017 –2022

Manuel Lumban Tobing

12170212

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

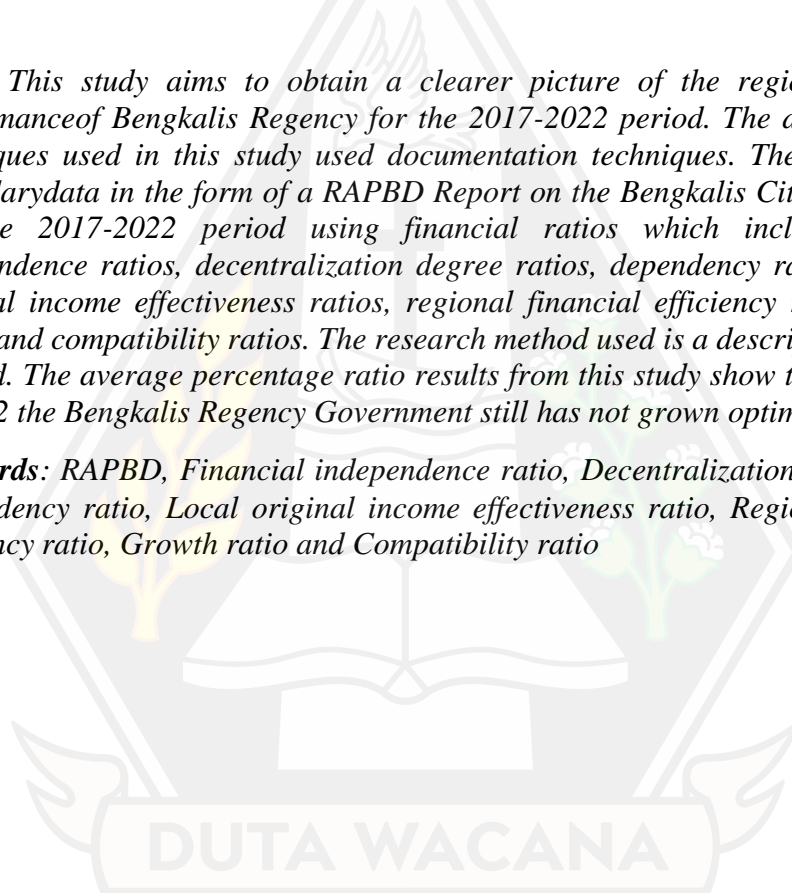
Universitas Kristen Duta Wacana

12170212@students.ukdw.ac.id

ABSTRACT

This study aims to obtain a clearer picture of the regional financial performance of Bengkulu Regency for the 2017-2022 period. The data collection techniques used in this study used documentation techniques. The data used is secondary data in the form of a RAPBD Report on the Bengkulu City Government for the 2017-2022 period using financial ratios which include financial independence ratios, decentralization degree ratios, dependency ratios, regional original income effectiveness ratios, regional financial efficiency ratios, growth ratios and compatibility ratios. The research method used is a descriptive research method. The average percentage ratio results from this study show that from 2017 to 2022 the Bengkulu Regency Government still has not grown optimally.

Keywords: *RAPBD, Financial independence ratio, Decentralization degree ratio, Dependency ratio, Local original income effectiveness ratio, Regional financial efficiency ratio, Growth ratio and Compatibility ratio*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal terjadinya kebijakan otonomi daerah ini terkait dengan upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia yang pada saat itu masih sangat sentralistik. Pemerintahan pusat yang mengatur dan mengendalikan seluruh urusan di daerah, seringkali menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan pengambilan keputusan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan urusan pemerintahan di daerahnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat daerah.

Selain itu, kebijakan otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia.

Kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari pengawasan pihak pemerintah daerah, pengukuran kinerja dilaksanakan untuk memenuhi beberapa tujuan. Pertama, untuk membantu proses perbaikan kinerja pemerintah. Kedua, untuk mendistribusikan sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, untuk menyatakan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi antar kelembagaan. Apabila suatu pencapaian kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan, maka kinerja dari organisasi dapat dikatakan baik. Namun, apabila perencanaan yang telah direncanakan tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka kinerjanya dapat dikatakan buruk atau kurang baik. Kinerja keuangan merupakan alat ukur mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kedudukan Kepala Daerah setara dengan DPRD namun memiliki fungsi yang berbeda. Kepala daerah akan menganggarkan dana yang akan dialokasikan untuk daerahnya selama satu tahun dan DPRD akan mengesahkan rancangan tersebut. DPRD dan kepala daerah selaku Pemerintah Daerah akan bekerja sama dalam membentuk sebuah peraturan daerah (Perda). Dalam penyusunan perda tersebut Pemerintah Daerah dapat menyusun atas dasar situasi di daerah masing-masing namun perda yang disusun tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing masing dimana pemerintah daerah memiliki hak atas pengelolaan potensi daerah untuk menjadi pendapatan asli daerah, disisi lain dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pemberian pelayanan publik secara optimal oleh karena itu keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat krusial dan penting untuk menjadi penentu terhadap keberhasilan semua upaya dan kegiatan yang dilaksanakan pada otonomi daerah. Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan, selain itu analisis rasio terhadap (APBD) dapat juga menilai efektivitas otonomi daerah dimana hak yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu oleh Julio Ronaldo Damanik (2018) yang mengukur kinerja pemerintah daerah menggunakan beberapa rasio diantaranya adalah rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas dan rasio derajat desentralisasi. Dengan beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian maka dapat disimpulkan kinerja keuangan daerah yang diteliti oleh penulis, namun beberapa aspek tidak dapat diteliti seperti rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan kemandirian keuangan daerah, dimana hasil dari rasio ini mempengaruhi kesimpulan yang lebih akurat yang dapat ditarik oleh penulis, maka dari itu pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa rasio,

diantaranya rasio desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian dan rasio efisiensi.

Penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis secara umum dikatakan cukup baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yang digunakan yakni penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis dikarenakan luas wilayah yang kabupaten Bengkalis yang menjadi salah satu dari Kabupaten terluas di Riau dengan letak geografis yang sangat strategis juga memiliki banyak potensi asli daerah yang dapat dimaksimalkan salah satunya seperti sumberdaya alam dan pariwisata. Dengan kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Bengkalis menjadi Kabupaten yang sangat berpotensi dan memiliki harapan yang sangat tinggi untuk menjadi salah satu Kabupaten terkaya di Indonesia, daengan demikian potensi yang sangat tinggi diharapkan dapat memiliki kinerja keuangan daerah yang baik dalam menaikkan pembangunan daerah dari berbagai aspek.

Keberlanjutan organisasi bergantung pada pentingnya melakukan evaluasi eksternal dan internal. Gagasan ini juga dikemukakan oleh Albert S. Humphrey, seorang konsultan manajemen Amerika, yang memperkenalkan metode analisis SWOT, yang meliputi penilaian terhadap Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT berfungsi sebagai alat analisis yang berharga bagi organisasi untuk mengevaluasi posisi mereka dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis. Grameds bisa sangat diuntungkan dengan memanfaatkan analisis SWOT karena membantu dalam persiapan dan perencanaan proyek atau usaha bisnis. Sederhananya, analisis SWOT dapat dianggap sebagai pendekatan perencanaan strategis yang mempertimbangkan dan mengkaji empat komponen

utama seperti *Strengths* (Kekuatan); *Weaknesses* (Kelemahan) *Opportunities* (Peluang); dan *Threats* (Ancaman).

Dari apa yang sudah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkalis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda yaitu kinerja keuangan di Kabupaten Bengkalis. Judul dari penelitian yang diajukan oleh penulis adalah “Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkalis.”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja dan kondisi keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017-2022 diukur dengan dengan (1) Rasio Desentralisasi, (2) Rasio Ketergantungan, (3) Rasio Pertumbuhan, (4) Rasio Kemandirian, (5) Rasio Efektivitas, (6) Rasio Keserasian, dan (7) Rasio Efisiensi

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis bagi beberapa pihak yang berkepentingan:

- a) Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi akademisi untuk mendapatkan informasi yang dapat menjadi bahan penelitian dan pembahasan sejenis.

b) Pemerintah daerah Bengkulu

Manfaat penelitian analisis kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu dapat menjadi bahan acuan untuk melihat kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkulu dan memperoleh informasi mengenai kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu yang diharapkan untuk digunakan memajukan daerah Kabupaten Bengkulu.

c) Pemerintah Pusat

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah pusat adalah untuk dapat melihat perkembangan daerah otonom seperti kabupaten Bengkulu.

d) Masyarakat Kabupaten Bengkulu

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sarana masyarakat di daerah Kabupaten Bengkulu untuk mengetahui kinerja keuangan dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan dimana penelitian ini berfokus kepada Kabupaten Bengkulu dan menggunakan data keuangan pada periode 2017-2022.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penghitungan rasio dari keuangan daerah periode 2017-2022 dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan persentase rata-rata 8.23% dengan kriteria sangat kurang. Persentase yang rendah tersebut diakibatkan rendahnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah.
- b. Rasio pertumbuhan rata-rata persentase dalam lima tahun 0,14% dengan kriteria rendah. Rendahnya persentase rasio pertumbuhan tersebut diakibatkan kurang efisiennya kinerja Pemerintah Daerah mengakibatkan kurangnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis, sehingga PAD Kabupaten Bengkalis tergolong kecil dan tidak ada perkembangan yang signifikan.
- c. Persentase penghitungan rasio kemandirian menunjukkan kriteria rendah sekali dengan rata-rata 9,60%. Persentase yang rendah tersebut diakibatkan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer oleh daerah namun PAD sangat rendah, sehingga persentase kemandirian daerah sangat rendah

- d. Rasio efektivitas menunjukkan rata-rata persentase 79,53% dengan kriteria kurang efektif. Artinya Pemerintah Daerah masih belum maksimal dalam merealisasikan pendapatan PAD dengan baik oleh Pemerintah Daerah.
- e. Pada rasio keserasian mengalami hubungan yang terbalik antara belanja modal dan belanja operasi yang dibandingkan dengan total belanja daerah. Rata-rata penghitungan pada belanja modal menunjukkan kriteria yang tidak baik dengan rata-rata persentase 25,38% sedangkan pada penghitungan belanja operasi rata-rata persentase 109,73% dengan kriteria baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih berfokus pada belanja operasi dengan memprioritaskan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
- f. Rasio efisiensi menunjukkan kriteria tidak efisien dengan rata-rata persentase 107,23%. Penghitungan rasio ini berdasarkan perbandingan realisasi belanja dan realisasi penerimaan. Rasio efisiensi berbanding terbalik dari penghitungan rasio efektivitas.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis periode 2017-2022 yang hitung dengan rasio, penulis memberikan rekomendasi/saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Masyarakat, dan penelitian selanjutnya.

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

Potensi, kelebihan, kelemahan dan peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis yang terdapat pada analisis SWOT, dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pengembangan SDM yang didampingkan oleh Pemerintah Daerah dengan pengadaan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, pelatihan SDM, pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang maksimal seperti pengembangan industri perkebunan dan pariwisata, serta pemanfaatan peluang yang dimiliki daerah seperti SDA yang memadai akan dapat memberikan hasil penghitungan yang baik pada PAD. Hasil yang baik pada penghitungan PAD Akan memberikan hasil yang baik pada penghitungan rasio keuangan PAD, serta menunjukkan kestabilan pemasukan dan pengeluaran keuangan daerah. Kestabilan keuangan Akan menunjukkan hasil yang baik pada efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah.

b. Masyarakat Kabupaten Bengkalis

Masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat lebih aktif melakukan pembayaran pajak dan retribusi untuk mendorong pendapatan daerah. Pajak dan retribusi yang telah diberikan oleh masyarakat dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat juga harus berperan aktif dalam membantu mengawasi perkembangan infrastruktur dan layanan masyarakat.

c. Pengujian Data Berikutnya

Bagi pengujian data yang Akan dilakukan selanjutnya dapat menguji dengan rasio yang berbeda untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah pada penghitungan yang lain. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti kinerja keuangan daerah lebih dari Lima tahun untuk menunjukkan perhitungan yang lebih baik dengan perbandingan yang lebih banyak, agar menunjukkan perkembangan keuangan daerah yang lebih baik. Pada penghitungan rasio efektivitas penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan informasi dari sumber yang terpercaya untuk mendapatkan data efektivitas anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah untuk menghindari kecenderungan kecurangan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penghitungan rasio efektivitas yang baik. Pada data analisis SWOT penelitian selanjutnya dapat meneliti data dari Kantor BPKAD setempat secara langsung untuk mendapatkan data yang lebih baik. Untuk tempat penelitian agar bisa diperluas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiah, Alissa, and Muhamad Muslih. (Tahun 2012-2016). Pengaruh leverage, profitabilitas, dan good corporate governance terhadap financial distress (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Ekspansi: Jurnal Ekonomi*.
- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5).
- Chasanah, Shania Nur, and Jihad Lukis Panjawa. (2020). Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 5.1* , 151-173.
- Erawan, Putu Adi, et al. ((2018)). Peranan Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika 8.3* .
- Fathah, Rigel Nurul. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul." . *Ebbank 8.1* , 33-48.
- H, K. (2004). Ekonomi Pembangunan Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. . *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(1)*, 47–63.
- Halim Abdul, e. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hapsari, Ratih Nurmalita. (2022). "PENGARUH KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA. *Ekonomi dan Bisnis*, 28-43.
- Harahap, H. F. (2020.). Analisis Kinerja Lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- J, P. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti* . , Vol. 7 No. 13: 83-112.
- J, S. (2018). Penerapan Konsep Value For Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 158-170.
- Karo, B., & Lita, E. (2019). ANALISA LAPORAN KEUANGAN PADA PT TELKOMSEL TBK DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016- 2017.
- Mahmudi. ((2010)). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua Yogyakarta . *UPP STIM YKPN*.
- Nur Hidayana D. (2021). PENGARUH KUALITAS AUDIT, REPUTASI AUDITOR, DEBT DEFAULT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2020. *Doctoral dissertation, Universita*

Muhammadiyah Ponogoro.

- OKTAVIUS, Valensia. (2022). Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Terhadap (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). . *PhD Thesis. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.*
- Pasaribu, Esti, et al. . (2021). Analisis Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. . *AKUNTABILITAS*, Vol 15, No 1.
- Pramono, Joko. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti 7.1* .
- Pramono, Joko. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta. *Among Makarti 7.1.*
- Ropa, Mega Oktavia. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 4.2.*
- Saputra, Reza Wahyu. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Ditinjau dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013-2015). *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Sijabat M. Y, S. C. (2014). Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008-2012. *Administrasi Publik, 2(2), 236-242.*
- Sutomo, S., & Putri, E. I. K. . ((2016)). Erlinda, N., Fauzi, A., Assessment of sustainable regional development policies: a case study of Jambi province, Indonesia. *Economics, 4(5), , 224-237.*
- Yulianty, Rochimah. (2020). Pengaruh sustainability reporting terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, dan Akuntansi 4.1, 12-24*

DUTA WACANA